

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH BUDIPITOJO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **732907**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.855.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/161 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
2. Tanah Seluas 281 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah Seluas 1575 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/125 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/80 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 501.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
7. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
8. LAINNYA, ELEMEN SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
9. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	81.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	346.752.779
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.784.252.779
III. HUTANG	Rp.	126.545.265
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.657.707.514

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.